

FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH KOTA MANADO

Maria Grace Damopolii
Leonardus R. Rengkung
Charles R. Ngangi

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the function of supervision of the Manado City Inspectorate Office to the regional apparatus. The research method used is descriptive qualitative. This research is located in Manado City that is to Inspection Office of Manado City. The data collected in the form of reports on the results of supervisory activities are audit report, evaluation report, monitoring report and report result of review for 3 (three) years from 2013 until 2015 in the authorities and agencies in Manado City. In this study was used comparative data analysis. There are three main findings of this research are: firstly, from the analisis result of supervision function in the form of audit, evaluation, monitoring and review that have conducted by Inspectorate of Manado City toward Manado City Local Government Offices administration, there is a significant decrease of findings from all examination object or auditee. Secondly, from the decreasing number of findings indicates that the supervisory function performed by the Manado City Inspectorate on the Manado City Local Government implementation is done with good and optimal performance. Third, the influence of the Inspectorate's supervisory function on the performance of the regional apparatus of Manado City Government indicates that the Manado City Inspectorate has succeeded in performing its supervisory function as a quality assurance or guarantor of quality toward the performance of official of Local Governments in Manado City.

Key Word: Manado City Government, Manado City Inspectorate, Control Function, Finds Number, Trend.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi pengawasan Inspektorat terhadap perangkat daerah di Kota Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Manado yaitu terhadap Kantor Inspektorat Kota Manado. Data yang dikumpulkan berupa laporan hasil kegiatan pengawasan yaitu laporan hasil audit, laporan hasil evaluasi, laporan hasil monitoring dan laporan hasil reviu selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2015 pada dinas dan badan yang ada di Kota Manado. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data komparatif atau perbandingan. Terdapat tiga temuan utama dari penelitian ini yaitu: pertama, dari hasil analisis terhadap fungsi pengawasan berupa audit, evaluasi, monitoring dan reviu yang dilakukan Inspektorat Kota Manado terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado terjadi penurunan jumlah temuan yang signifikan dari semua obyek pemeriksaan atau auditi. Kedua, dari penurunan jumlah temuan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Manado terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado dilakukan dengan capaian yang baik dan optimal. Ketiga, pengaruh fungsi pengawasan Inspektorat terhadap kinerja perangkat daerah pemerintah Kota Manado mengindikasikan bahwa Inspektorat Kota Manado telah berhasil melaksanakan fungsi pengawasannya sebagai *quality assurance* atau penjamin mutu terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.

Kata kunci: Pemerintah Kota Manado, Inspektorat Kota Manado, fungsi pengawasan, jumlah temuan, trend atau kecenderungan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Namun demikian kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Didalam sistem pemerintahan Indonesia sendiri, untuk melaksanakan peran pengawasan ini, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pengawasan pada lingkungan kementerian dilaksanakan oleh Menteri dan Pimpinan Lembaga Non Departemen melalui Inspektur Jenderal Departemen atau Pimpinan Badan atau Unit yang diberi tugas melaksanakan pengawasan. Pada tingkat Pemerintahan Provinsi maka pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Badan atau Lembaga Pengawasan Daerah Provinsi, yaitu Inspektorat Provinsi sedangkan pada tingkat Pemerintahan Kabupaten dan Kota maka peran pengawasan dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota melalui Badan atau Lembaga Pengawasan Daerah kabupaten dan Kota yaitu Inspektorat Kabupaten dan Kota.

Inspektorat Kota Manado sebagai salah satu lembaga pengawas intern pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melakukan pengawasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado, Inspektorat melakukan pengawasan yang terbagi atas audit, monitoring/pemantauan, reviu dan evaluasi sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang terdiri atas: Pemeriksaan Reguler dimana aspek yang diperiksa meliputi aspek kebijakan daerah,

aspek kelembagaan, aspek pegawai daerah, aspek keuangan daerah dan aspek barang daerah, Pemeriksaan khusus karena adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat atau permintaan bantuan pemeriksaan dari pihak eksternal, selain itu ada juga Audit untuk tujuan tertentu yaitu audit barang dan jasa, dimana audit dilakukan khusus pada pengadaan barang/ jasa pemerintah, Evaluasi dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L-KIP), Monitoring/pemantauan dilakukan terhadap persediaan barang habis pakai, dan Reviu dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi pengawasan Inspektorat terhadap organisasi perangkat daerah Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi pengawasan Inspektorat terhadap perangkat daerah Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang digariskan. Menurut Sonny Sumarsono pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah di gariskan (Sumarsono, 2010). Sedangkan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sumarsono, 2010).

Menurut Prayudi pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan (Prayudi, 1981). Manullang mengatakan bahwa

pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manullang, 1995).

Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, melalui tinjauan dari beberapa segi, antara lain:

- 1) Pengawasan ditinjau dari segi hubungan antara subjek pengawasan atau pihak yang melakukan dan objek yang diawasi.
- 2) Pengawasan dilihat dari segi kewenangan.
- 3) Pengawasan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan.

Inspektorat Sebagai Unit Pengawasan

Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pada tingkat Pemerintahan Provinsi pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Badan atau Lembaga Pengawasan Daerah Provinsi, yaitu Inspektorat Provinsi sedangkan pada tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota maka fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota melalui Badan atau Lembaga Pengawasan Daerah kabupaten/Kota yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur atau Walikota dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang menjadi acuan, arahan, ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan peraturan daerah. Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Pengawasan Inspektorat Kota Manado

Sebagai implementasi Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pengawasan pada tingkatan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/walikota melalui Inspektorat Kabupaten/Kota, maka di kota

Manado sendiri fungsi pengawasan menjadi tanggung jawab Inspektorat Kota Manado.

Dalam melaksanakan peran pengawasan tersebut, maka Inspektorat Kota Manado melakukan empat kegiatan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai bagian tugas yang dipercayakan oleh pemerintah melalui amanat pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

Berdasarkan landasan hukum dan standar tersebut maka fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Manado dilakukan dalam 4 (empat) bentuk yaitu Audit, Evaluasi, Monitoring dan Reviu.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif alamiah dimana peneliti sendiri berperan sebagai instrument kunci.

Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Manado yaitu di Inspektorat Kota Manado. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah fungsi pengawasan Inspektorat Kota Manado berupa laporan hasil kegiatan pengawasan yaitu laporan hasil audit, laporan hasil evaluasi, laporan hasil monitoring dan laporan hasil reviu selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2013 hingga tahun 2015 pada perangkat daerah yang jadi obyek pemeriksaan atau auditi atau pada dinas dan badan yang ada di Kota Manado.

Teknik Pengumpulan Data

Melalui studi dokumenter maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data Primer berupa data-data pengawasan Inspektorat Kota Manado melalui kegiatan Audit, Evaluasi, Monitoring dan Reviu

yang dilakukan dalam kurun waktu 2013-2015 pada obyek pemeriksaan atau auditi yaitu pada 22 dinas dan 6 badan yang ada pada Pemerintah Kota Manado. Data Sekunder berupa data-data hasil wawancara dan data-data dokumenter terkait masalah penelitian ini baik itu yang ada di buku, jurnal, koran, majalah dan lain-lain.

Pengukuran Variabel Penelitian

Pengukuran variable penelitian Pengaruh Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado yang diteliti dalam penelitian ini akan dirumuskan melalui variable-variabel yang ada dalam tabel dibawah ini.

Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan jenis pengolahan data komparatif atau perbandingan. Oleh karena itu data yang diperoleh dalam penelitian akan dibandingkan berdasarkan indikator penelitian yaitu jumlah temuan pada perangkat daerah selama kurun waktu pemeriksaan 2013 – 2015. Pengukuran indikator yang dipakai adalah bahwa semakin sedikit jumlah temuan pada perangkat daerah bersangkutan dari tahun pemeriksaan 2013, 2014 dan 2015 maka semakin baik dan sebaliknya semakin banyak jumlah temuan maka semakin kurang baik atau buruk. Semakin sedikit jumlah temuan tersebut juga menggambarkan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Manado semakin baik dan optimal. Sebaliknya semakin banyak jumlah temuan menggambarkan fungsi pengawasan Inspektorat semakin kurang baik atau buruk dan kurang optimal.

Perbandingan atau komparasi juga akan dilakukan antara temuan yang dihasilkan dari fungsi pengawasan Inspektorat Kota Manado dengan hasil temuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado serta hasil temuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa KeuangannRepublik Indonesia (BPK-RI) pada Perangkat Daerah pemerintah Kota Manado.

Jenis pengolahan data yang juga akan dipakai dalam penelitian ini adalah *expert opinion* atau meminta pendapat ahli. *Expert Opinion* ini merupakan langkah analisis

terhadap komparasi hasil pemeriksaan yang dilakukan. *Expert opinion* ini juga dilakukan untuk menghindari subyektifitas peneliti dalam menarik kesimpulan hasil penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Manado baik berupa audit, evaluasi, monitoring dan reviu dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2015, maka temuan pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado dapat diurai sebagai berikut.

Pada hasil pemeriksaan tahun 2013 terdapat temuan pada semua perangkat daerah yang ada. Meski jumlahnya bervariasi namun menunjukkan bahwa semua perangkat daerah yang diperiksa belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Bahkan pada beberapa perangkat daerah hasil temuan terbilang cukup tinggi seperti misalnya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sebanyak 7 (tujuh) temuan. Pada dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang masing-masing sebanyak 6 (enam) temuan. Juga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas dan Pariwisata, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah masing-masing sebanyak 5 (lima) temuan. Sedangkan perangkat daerah yang tersisa berkisar pada 2 hingga 4 temuan.

Meskipun pada beberapa perangkat daerah jumlah temuan cenderung sama bahkan ada yang naik namun secara umum hasil pemeriksaan tahun 2014 menunjukkan penurunan temuan. Jumlah temuan tertinggi terdapat pada dua perangkat daerah yaitu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 5 (lima) temuan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat juga sebanyak 5 (lima) temuan, naik dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 2 (dua) temuan. Pada perangkat daerah lainnya jumlah temuan sebanyak 1 hingga 4 temuan. Penurunan jumlah temuan juga terlihat dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2015. Penurunan jumlah temuan yang terjadi pada

perangkat daerah berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2015 bahkan tergolong cukup signifikan oleh pada sejumlah perangkat daerah yang ada tidak terdapat temuan. Perangkat daerah yang tidak ditemukan temuan sebanyak 11 (sebelas) dinas dan badan. Sebanyak 10 (sepuluh) perangkat daerah hanya terdapat sebanyak 1 (satu) temuan sedangkan pada perangkat daerah yang tersisa terdiri dari 2 dan 3 temuan.

Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado pada tahun 2013 secara umum terdapat 7 (tujuh) temuan pada 4 (empat) perangkat daerah yang ada. Pada pemeriksaan yang dilakukan tahun 2014 juga terdapat temuan masih pada 4 (empat) perangkat daerah yang ada namun demikian terjadi penurunan jumlah temuan dari yang sebelumnya berjumlah 7 (tujuh) temuan pada tahun 2013 menjadi 6 (enam) temuan. Hasil yang berbeda diperoleh pada pemeriksaan yang dilakukan tahun 2015 terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado, dimana menunjukkan terjadi peningkatan baik pada jumlah temuan secara keseluruhan yaitu sebanyak 11 (sebelas) temuan pada 9 (sembilan) perangkat daerah.

Temua Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Pada pemeriksaan yang dilakukan tahun 2013 secara keseluruhan ditemukan 6 (enam) temuan pada 5 (lima) perangkat daerah. Hasil pemeriksaan tahun 2014 secara keseluruhan terdapat 7 (tujuh) temuan. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan jumlah temuan yaitu dari yang sebelumnya hanya 6 (enam) temuan pada tahun 2013. Kenaikan jumlah temuan yang signifikan terjadi pada hasil pemeriksaan tahun 2015. Dimana secara keseluruhan berjumlah 25 (dua puluh lima) temuan dan terdapat pada 12 (dua belas) perangkat daerah.

Capaian Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Manado

1) Membandingkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Manado, Inspektorat Sulawesi Utara dan BPK RI

Berdasarkan fungsi pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan audit, evaluasi, monitoring dan revidu maka capaian fungsi pengawasan Inspektorat Kota Manado dapat dirangkum dalam sebuah kesimpulan sementara bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Inspektorat Kota Manado sudah melaksanakan hal tersebut secara maksimal dimana hal itu terlihat dari jumlah temuan yang menunjukkan kecenderungan menurun.

Namun demikian, untuk mendapatkan hasil penelitian seobyektif mungkin maka perlu dilakukan perbandingan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Manado, hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2015 terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.

Sebuah temuan menarik diperoleh ketika membandingkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Manado, hasil pemeriksaa Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dan hasil pemeriksaan BPK RI yaitu pada temuan dari pemeriksaan Inspektorat Kota Manado dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara terjadi *trend* atau kecenderungan penurunan jumlah temuan. Namun *trend* atau kecenderungan berbeda diperoleh dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, dimana justru terjadi peningkatan jumlah temuan pada perangkat daerah yang menjadi obyek pemeriksaan atau audit.

2) Optimalisasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Manado

Berdasarkan perbandingan hasil temuan maka terdapat *gap* atau perbedaan yang cukup signifikan khususnya pada *trend* atau kecenderungan hasil temuan antara hasil yang diperoleh Inspektorat Kota Manado dan hasil pemeriksaan BPK RI, dimana temuan Inspektorat Kota Manado dari tahun 2013 ke tahun 2015 yang cenderung menurun dan temuan BPK RI dari tahun 2013 ke tahun 2015 yang cenderung naik.

Untuk menganalisis perbedaan ini, maka penulis melakukan pengujian melalui *expert opinion* atau meminta pendapat ahli

melalui wawancara tertutup kepada beberapa pihak; Inspektur Pembantu di Inspektorat Kota Manado sebanyak 4 orang yang selanjutnya disebut sebagai ahli kelompok 1, Auditor di Inspektorat Kota Manado sebanyak 4 (empat) orang dan Auditor di Inspektorat Provinsi sebanyak 3 orang yang untuk selanjutnya disebut sebagai ahli kelompok 2 pada 5 (tiga) kepala dinas/badan pada perangkat daerah kota Manado yang dipilih secara *random* yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai ahli kelompok 3.

Dari wawancara tertutup tersebut terdapat beberapa pertanyaan kunci dengan jenis pertanyaan tertutup yang ditujukan kepada masing-masing kelompok ahli yang menurut hemat penulis sesuai dengan kapasitas mereka untuk memberikan pendapat. Hal yang ditanyakan menyangkut kesamaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Manado sama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, perbedaan antara hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Manado dengan hasil pemeriksaan BPK RI, kebenaran pemeriksaaan antara Inspektorat Kota Manado dan BPK RI, pemeriksaan terhadap perangkat daerah/dinas oleh Inspektorat Kota Manado, pemeriksaan terhadap perangkat daerah/dinas yang anda pimpin oleh BPK RI, penilaian terhadap sikap professional auditor Inspektorat Kota Manado,

Dari hasil data yang diperoleh melalui *expert opinion* atau pendapat ahli maka hasil analisis terhadap perbedaan kecenderungan temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Manado dengan hasil pemeriksaan BPK RI dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Manado dan BPK RI berbeda.
- 2) Perbedaan disebabkan oleh beberapa hal. Namun faktor yang paling utama yang menyebabkan perbedaan itu adalah ruang

lingkup pemeriksaan, dimana ruang lingkup pemeriksaan BPK RI jauh lebih luas dibandingkan dengan ruang lingkup pemeriksaan Inspektorat Kota Manado. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kedudukan dan tanggung jawab area pemeriksaan BPK RI yang jauh lebih besar dari Inspektorat Kota Manado.

- 3) Akibat dari perbedaan tersebut, maka hasil pemeriksaan juga akan ikut dipengaruhi.
- 4) Meskipun terdapat perbedaan ruang lingkup pemeriksaan yang berakibat pada hasil pemeriksaan yang berbeda juga, namun demikian hal ini tidak menimbulkan masalah.
- 5) Oleh karena itu tidak ada yang paling benar dari hasil pemeriksaan yang berbeda baik itu Inspektorat Kota Manado maupun BPK RI karena kedua-duanya sama-sama benar.
- 6) Karena pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan baik oleh Inspektorat Kota Manado maupun BPK RI dilakukan berdasarkan tata pelaksanaan pemeriksaan dan sikap yang professional.

Oleh karena itu berdasarkan kesimpulan dari uji *expert opinion* atau pendapat ahli ini maka jelaslah bahwa perbedaan *trend* atau kecenderungan yang ditunjukkan dalam temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Manado dan BPK RI tidak menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan salah satu dari kedua lembaga ini yakni Inspektorat Kota Manado atau BPK RI bermasalah. Perbedaan *trend* atau kecenderungan yang terjadi justru menunjukkan bahwa kedua lembaga ini sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab fungsi pengawasan secara baik dan professional.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa melalui pemeriksaan yang dilakukannya, Inspektorat Kota Manado sudah melakukan fungsi pengawasannya berdasarkan cara-cara dan sikap yang professional sehingga hasil pemeriksaan itupun dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itu maka Inspektorat Kota Manado dapat disimpulkan telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado diperoleh beberapa kesimpulan:

- 1) Bahwa dari hasil fungsi pengawasan berupa audit, evaluasi, monitoring dan reviu yang dilakukan Inspektorat Kota Manado terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado terjadi penurunan jumlah temuan yang signifikan dari semua obyek pemeriksaan atau auditi.
- 2) Dari penurunan jumlah temuan maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Inspektorat terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado telah dilakukan dengan capaian yang baik dan optimal.
- 3) Pengaruh fungsi pengawasan Inspektorat terhadap kinerja perangkat daerah pemerintah Kota Manado mengindikasikan bahwa Inspektorat Kota Manado telah berhasil melaksanakan fungsi pengawasannya sebagai *quality assurance* atau penjamin mutu terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.

Saran

Dari hasil penelitian Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kota Manado kiranya perlu mempertahankan atau bahkan meningkatkan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan terhadap perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
- 2) Inspektorat Kota Manado kiranya dapat terus melakukan pendampingan dalam kerangka *quality assurance* bagi perangkat daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kota Manado.
- 3) Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kota Manado perlu kiranya terus mempertahankan bahkan meningkatkan secara optimal capaian yang selama ini sudah diraih agar semakin baik yang ditandai dengan main berkurangnya jumlah temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2007. Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Badan Pusat Statistik, 2016. manadokota.bps.go.id.
- Bappeda Manado, 2016. RPJMD Kota Manado 2016-2021. Manado: Bappeda Kota Manado.
- Bungin, B., 2010. Penelitian Kualitatif. 1 ed. Jakarta: Kencana.
- Evlap Inspektorat Kota Manado, 2015. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 - 2015, Manado: Inspektorat Kota Manado.
- Evlap Inspektorat Kota Manado, 2015. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 - 2015, Manado: Inspektorat Kota Manado.
- Indarwati, C. M., 2013. Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Inspektorat Kota Manado, 2013. Laporan Hasil Audit, Evaluasi, Monitoring & Reviu Tahun 2013, Manado: Inspektorat Kota Manado.
- Inspektorat Kota Manado, 2014. Laporan Hasil Audit, Evaluasi, Monitoring dan Reviu Tahun 2014, Manado: Inspektorat Kota Manado.
- Inspektorat Kota Manado, 2015. Laporan Hasil Audit, Evaluasi, Monitoring dan Reviu Tahun 2015, Manado: Inspektorat Kota Manado.
- Inspektorat Kota Manado, 2015. Rekapitulasi laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Manado Tahun 2013 - 2015, Manado: Inspektorat Kota Manado.
- Inspektorat Kota Manado, 2016. Rencana Strategi Inspektorat Kota Manado 2016- 2021. Manado: Bappeda Kota Manado.

- Kementerian Dalam Negeri RI, 2007. Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri RI, 2007. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri RI, 2008. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mangkunegara, A. P., 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manullang, M., 1995. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2005. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025, Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Mulyana, D., 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musdar, M., 2014. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP): Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Wakatobi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Pemerintah Kota Manado, 2016. Peraturan Walikota Manado Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota. Manado: Sekretariat Daerah Kota Manado.
- Prayudi, 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salindeho, J., 1998. Tata Laksana Dalam Manajemen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sandy, M. M., 2015. Karakteristik Pekerjaan dan Kinerja Dosen Luar Biasa UIN Sunan Gunung Jati: Komitmen Organisasi Sebagai variabel Moderating. Bandung: Widayatama Bandung.
- Silalahi, U., 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekarno, 1986. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Miswar.
- Soewarno, H., 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
- Sumarsono, S., 2010. Manajemen Keuangan Pemerintah. Jakarta: Graha Ilmu.